

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Banda Nawawi, Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan No penal: Pustaka Magister ,2010
- BPOM, ”Inovasi Badan POM dalam pengawasan narkotika,” 2020.
- Arief, Barda Nawawi. Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan No Penal. Semarang: Pustaka Magister, 2010.
- Barkatullah, Abdul Halim. Hukum Transaksi Elektronik Sebagai Panduan Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indonesia. Bandung: Nusa Media, 2017.
- Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Mansur, Dikdik M Arief., Gultom, Elsitaris. Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi.
- Darmodiharjo, Sidharta Darji. Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia. Jakarta: Gramedia, 1995.
- Eddy O., S Hiariej, dkk. Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus, Jakarta: Pena Budi Aksara, 2006.
- Fahmi, Umar. Kesehatan Masyarakat Teori dan Aplikasi. Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Hamzah, Andi. KUHP & KUHPA Cetakan ke 17. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHPA Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Hardjosaputra, Purwanto. Daftar Obat Edisi II. Jakarta: PT. Mulia Purna Jaya Terbit, 2008.
- Hasan, M. Iqbal. Pokok-pokok Metodologi dan Aplikasinya. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Ishaq. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Kementerian Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya. Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013.

- Kotler dan Amstrong. Prinsip-Prinsip Pemasaran Jilid 2.
Jakarta:Airlangga, 2001.
- LaFave, Wayne. The Decision to Take a Suspect Into Custody. Boston:Little ,
Brownand Company, 1964.
- Mahalli, KH. Ahmad Mudjib. Hadis-Hadis Muttafaq „Alaih: Bagian Ibadat.
Jakarta: Kencana, 2003.
- Mahmud, Peter. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta:Kencana Prenada,
2012.
- Manulang, Fernando M. Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum.
Jakaarta:Kencana , 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta:Kencana,
2014.
- Marzuki, Peter Mahmud. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta:Kencana Prenada. 2012.
- Muladi. Kapita Selektta Hukum Pidana. Semarang:Badan Penerbit UNDIP, 1995.
141
- Muladi. Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit
Universitas Diponegoro, 1995.
- Mulyadi, Lilik. Kapita Selektta Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi,
Jakarta:T Jambatan, 2004.
- Puspa, Yan Pramadya. Kamus Hukum. Semarang:Aneka Ilmi,
1977)
- Rahardjo, Satjipto. Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis.
Bandung:Sinar Baru, 2004.
- Rahardjo,Satjipto. Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum.
Semarang: Kerja Sama Pustaka Pelajar IAIN Walisongo dan Program Doktor
Ilmu Hukum UNDIP
- Rahardjo,Satjipto. Masalah Penegakan Hukum:Suatu Tinjauan Sosiologis.
Bandung:Sinar Baru, 2005.
- Rustam, Erlina. Bahan Ajar Farmakologi Pada Jurusan Kebidanan Politeknik
Kemenkes Padang, 2009.

- Shan, Dellyana. Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta:Liberty, 1988.
- Siswati, Sri Siswati. Etika dan Hukum Kesehatan. Jakarta:Rajawali Pers, 2013.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta:Rajawali Pers, 2007.
- Soekanto, Soerjono. Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989.
- Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1993.
- Soerodibroto, R Soenarto. Kuhp & Kuhap. Jakarta: Rajawali Pers, 1991.
- Sugeng. Hukum Telematika Indonesia. Kencana:Jakarta, 2020.
- Zainal, Abidin. Asas-Asas Huk
- Rosidah, Nikmah. Asas-Asas Hukum Pidana. Semarang: Magister Semarang, 2011.
- Sunarto. Keterpaduan Dalam Penanggulangan Kejahatan, Edisi Revisi. Bandar Lampung: Aura Anugrah Utama Raharja, 2013.

Perundang-undangan

- Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020 tentang pengawasan obat dan makanan yang diedarkan secara daring.
- Permenkes Nomor 1010/MENKES/PER/XI2008 Tentang kriteria taat laksana registrasi obat.
- Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawasan Obat Dan Makanan .
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi elektronik(UU ITE).
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.
- Keputusan Kepala BPOM No. 0200/SK/KBPOM tentang Organisasi dan Tata

kerja Badan POM.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun tentang pedoman pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Peredaran,penyimpanan,pemusnahan,dan pelaporan Narkotika.

Jurnal

Abdullah K. “Tahapan Dan Langkah-Langkah Penelitian”, Cet. I; Watampone: Luqman Al- Hakim Press, 2013. Asosiasi Telemidisin Indonesia, masukan atensi terhadap RDPU

RUU POM Komisi IX DPR RI dengan Atensi, Jakarta. Bagus, Pambudi Dwi dan Raharjo Danang. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Obat Tradisional Tanpa Izin Edar di Media Sosial”, Jurnal University Research Colloquium 5, No 3, 2016.

Halim, Abdul. “Teori-Teori Hukum Aliran Positivisme dan Perkembangan Kritik-Kritiknya”, Jurnal Asy-Syir’ah Vol. 41(2), 2009. 143

Hijawati. “Peredaran Obat Ilegal ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen”, Jurnal Solusi Vol.18 Nomor 3 Tahun 2020.

Kozinets dan Robert V., et al, “Networked Narrative:

Understanding World-of-mouth- marketing in online communities”, Journal of Marketing 74.2,2010.

Kusuma, Deny Yosef Wijoyo., dkk. “Implementasi Peraturan Peredaran Obat secara Daring pada Masyarakat di prakter Pelayanan Kefarmasian Apotek”, Jurnal AKFARINDO Vol 7 No. I 2022.

Mackey T.K dan Nayyar G. “Digital Danger: A Review of the Global public healt, patient safety and Cybersecurity Threats Posed by Illicit Online Pharmacies”, British Medical Bulletin.

Muh. Marzuki. Skripsi: Tinjauan Yuridis terhadap peran BBPOM dalam menangani dan menanggulangi peredaran obat tidak berizin di Kabupaten Bone, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, IAIN Bone.

Muliadi S. “Efektivitas Hukum Pidana Melalui Pengelolaan Sumber Daya Manusia di daerah untuk Mencapai Penegakan Hukum”, Jurnal Academica Fisip Untad, 126. Vol. 06.02.

NOFRIZAL, PELDI. “Tesis :Koordinasi Fungsional antara

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan Penyidik 144

POLRI dalam penegakan hukum terhadap Peredaran Obat dan Makanan Ilegal”, Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang, 2017.

Pambudi, Dwi Bagus dan Raharjo, Danang. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Obat Tradisional Tanpa Izin Edar di Media Online”, Jurnal University Research Colloquium 5, No. 4, 2020.

Puspita Rini dan Nuraini. “Pemanfaatan Media sosial sebagai media promosi (studi deskriptif pada happy go lucky house”, Jurnal Common, 3(1), diakses melalui <https://ojs.unikom.ac.id>.

Riswandi, Budi Agus. “Jurnal Hukum: Regulasi Hukum dalam Transaksi E-Commerce: Menuju Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Rosalina, Veni. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penjualan Obat Kadaluwarsa ditinjau dari hukum positif Indonesia”, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.2 No 7.

Sumarnatha, I Nyoman Ngurah. “Ringkasan Diskusi Bidang

Hukum: Penerapan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai Penipuan dalam Transaksi Elektronik”, Pusat Penelitian Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia: Jakarta, 2019.

Yuningsih, Rahmi. “Perlindungan Kesehatan Masyarakat Terhadap Peredaran Obat dan Makanan Daring”, Jurnal Aspirasi DPR : Masalah-masalah sosial I Volume 12, No. 1 Juni 2021.

Zuhaid, Turisno B, & Suharto R. “Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Obat tanpa Izin Edar yang dijual secara Online”, Diponegoro Law Journal, 5(3)

Website

Berita BPOM ungkap kasus pelanggaran tindak pidana penjualan obat ilegal online, diakses melalui www.pom.go.id. Pada hari Kamis, 8 September 2022.

Berita Mahkamah Konstitusi “Ancaman saat ini yakni lemahnya penegakan hukum di Indonesia.” diakses melalui www.mkri.id, pada hari Rabu, 7 September 2022.

Capella, “E-commerce, pengantar elektronik commerce”, diakses melalui www.capella.co.id, pada hari Kamis, 8 September 2022.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia(DUHAM),www.komnasham.co.id, diakses pada Selasa 2 Agustus 2022

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) diakses melalui www.kominfo.go.id. Pada hari Senin, 17 Oktober 2022

Kementerian komunikasi dan informatika (kemenkominfo), diakses melalui www.kominfo.go.id.

Mugiyanti, dalam konsultasi hukum, legal smart channel BPHN, diakses dalam isc.bphn.go.id.

Perkuat Pengawasan Obat dan Makanan melalui daring, BPOM Gandeng Asosiasi E-commerce dan market place Indonesia, www.pom.go.id.

Dokumen

Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi atas pasal tertentu dalam undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor; HK.00.05.3.1950 Tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Pasal 2 ayat (20) Peta Jalan SPNBE 2017-2019)

Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020 tentang pengawasan Obat dan Makanan yang di edarkan secara daring

Permenkes Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 Tentang Registrasi obat

Peraturan kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No 8 tentang kriteria tata laksana registrasi obat

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.

Undang-undang 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen